

*Kebijakan dan Strategi
Bidang Produksi Pangan
Dalam Mencapai Swasembada Pangan*

Oleh : **Dr. Soetatwo Hadiwigeno**
Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian R.I.
(Disampaikan oleh: **Dr. Effendi Pasandaran**)

Diselenggarakan oleh :
**PUSAT STUDI KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI
LEMBAGA PENELITIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam jiwa Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Karena itu dinamika pembangunan pertanian akan selalu mengacu pada pola dasar dan garis-garis besar perencanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, proses transformasi struktural perekonomian nasional telah dan akan terus berlanjut mengarah pada struktur perekonomian yang semakin berimbang seperti yang dicita-citakan.

Selama Pembangunan Jangka Panjang (PJPT) tahap I sektor pertanian berhasil meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Swasembada beras dicapai pada tahun 1984 dan mampu dipertahankan secara berkelanjutan. Produksi pangan lain, hasil-hasil peternakan dan perikanan tumbuh pesat diiringi peningkatan daya beli, serta pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang semakin berimbang, seiring dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam makalah ini pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan, dan strategi pembangunan pertanian dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam diuraikan secara ringkas. Pembahasan didahului dengan telaahan mengenai perkembangan produksi pangan, dan dilanjutkan dengan tinjauan tentang tantangan dan peluang pembangunan pertanian di masa datang. Atas dasar itu, kemudian disusun kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh.

II. PERKEMBANGAN PRODUKSI

Jalur utama pembangunan pertanian adalah kegiatan peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian. Kegiatan utama tersebut didukung pula oleh kegiatan-kegiatan lain yang pada bagian hulunya berupa kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada pemantapan sistem inputnya (kegiatan penelitian, pengadaan prasarana dan sarana produksi, perbaikan penerapan teknologi dan sebagainya) dan pada bagian hilirnya berupa kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada peningkatan nilai tambah baik dari segi bentuk, lokasi dan harga (kegiatan penanganan pasca panen dan pemasaran) dari komoditas pertanian yang dihasilkan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan tujuan-tujuan pembangunan pertanian yang berupa pelestarian swasembada pangan, peningkatan ekspor komoditas pertanian, peningkatan ketersediaan dan kontinuitas bahan baku untuk industri, peningkatan pendapatan petani dan peningkatan ketersediaan tambahan kesempatan kerja akan dapat dicapai secara simultan.

Selama PJPT I sektor pertanian telah berhasil meningkatkan berbagai produksi komoditi pertanian. Produksi padi meningkat dengan 4,0 persen per tahun; sedangkan produksi jagung, kedele, ubikayu dan kacang tanah masing-masing meningkat dengan rata-rata per tahun sebesar 7,0 persen, 7,3 persen, 1,6 persen dan 4,6 persen per tahun. Pertumbuhan ini dicapai melalui peningkatan luas panen, baik melalui perluasan areal ataupun peningkatan intensitas tanam dan peningkatan produktivitas. Dengan keragaan pertumbuhan produksi padi seperti tersebut diatas bangsa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras untuk pertama kali pada tahun 1984, dan mampu mempertahankannya secara berkelanjutan.

Produksi peternakan juga tumbuh dengan tingkat yang cukup mengesankan. Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu pada PJPT I masing-masing 5,9 persen, 10,4 persen dan 12,1 persen. Pada 3 tahun pertama Pelita V pertumbuhan produksi hasil-hasil ternak mencapai sekitar 5,5 persen untuk daging, 4,8 untuk telur, dan 3,1

persen untuk susu. Laju pertumbuhan produksi daging unggas dalam Pelita V tercatat yang paling tinggi, yaitu 13,1 persen per tahun. Pencapaian produksi ini lebih ditekankan pada pengembangan usaha peternakan rakyat. Usaha ini dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah dan kualitas bibit, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit, penyuluhan serta inseminasi buatan.

Secara umum pada PJPT I peningkatan produksi perikanan cukup pesat dengan laju pertumbuhan sekitar 4,9 persen per tahun. Pertumbuhan produksi perikanan laut naik dengan laju 5,9 persen dan perikanan darat naik dengan 2,9 persen per tahun. Sementara itu perkembangan perikanan tambak cukup pesat dengan laju 5 persen per tahun.

Secara total, produksi perkebunan naik dengan 4,9 persen per tahun, dengan keragaman pertumbuhan antar komoditas yang cukup besar. Pertumbuhan produksi komoditas perkebunan utama yang menonjol dicapai oleh minyak sawit, kelapa, kopi, cengkeh dan kakao.

Dengan keragaman pertumbuhan produksi tersebut dan dikaitkan dengan perkembangan harga-harga komoditas pertanian, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian selama periode 1969 - 1990 juga cukup mengesankan, yaitu sekitar 4,0 persen per tahun dengan jumlah tenaga kerja yang diserap rata-rata meningkat dengan 1,9 persen per tahun.

Lebih jauh lagi, sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam mengurangi penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, selain peranannya yang menonjol dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Telah diketahui bersama bahwa bagi penduduk pedesaan, sektor pertanian masih merupakan sumber mata pencaharian utama. Hasil perhitungan Biro Pusat Statistik memperlihatkan bahwa secara relatif maupun absolut penduduk miskin pedesaan menurun dari

40,4 persen pada tahun 1976 menjadi 14,3 persen pada tahun 1990, atau secara absolut menurun dari 44,2 juta orang menjadi tinggal 17,7 juta orang.

Sejalan dengan keberhasilan program pembangunan pertanian ini maka kesejahteraan juga meningkat. Hal ini terlihat dari penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan mayoritas tergantung pada sektor pertanian, seperti telah dikemukakan diatas. Demikian pula pemerataan pendapatan di pedesaan menunjukkan perbaikan yang ditandai oleh meningkatnya persentase pengeluaran oleh 40 persen penduduk berpenghasilan rendah di pedesaan dari 19,9 persen pada tahun 1978 menjadi 24,4 persen pada tahun 1990.

Keberhasilan program pembangunan pertanian telah menjadikan pula daerah pedesaan semakin terbuka terhadap hubungan antar desa dan kota serta arus informasi sehingga meningkatkan pola pikir petani menjadi semakin kritis dan rasional. Cara berusahatani berubah dari pola tradisional mengarah pada pola yang lebih modern. Keterbukaan tersebut mendorong terjadinya perubahan pola berusahatani dari orientasi subsisten menjadi orientasi komersial sehingga mereka dapat berusahatani yang mampu memanfaatkan peluang pasar untuk meraih keuntungan dan nilai tambah yang lebih besar.

III. TANTANGAN DAN PELUANG

Dengan dicapainya berbagai keberhasilan di atas, permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian pada PJPT II berubah secara dinamis, baik dalam titik berat permasalahannya maupun dalam intensitas tantangannya. Dalam PJPT II permasalahan pemenuhan pangan bukan lagi dari segi kuantitas saja tetapi juga dari segi kualitas yaitu berupa diversifikasi pangan, keseimbangan pangan dan gizi, serta pemenuhan permintaan pangan berkualitas dan aman bagi kesehatan yang semakin meningkat. Keadaan ini dapat diartikan bahwa misi utama sektor pertanian dalam hal pemenuhan penyediaan pangan diperluas dari pencapaian swasembada beras menjadi peningkatan kualitas pangan dan gizi masyarakat. Selain dalam hal pemenuhan pangan, peningkatan produksi pertanian untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan ekspor juga memerlukan upaya-upaya diversifikasi, peningkatan nilai tambah dan kualitas melalui perbaikan penanganan pasca panen dan pengembangan agroindustri.

Walaupun kualitas sumberdaya manusia pertanian telah semakin baik, namun dalam menghadapi dinamika pembangunan dalam PJPT II perbaikan kualitas sumberdaya manusia ini merupakan suatu keharusan. Tantangan yang dihadapi dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah termasuk peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh; peningkatan pendidikan, keterampilan, dan daya nalar dalam menghadapi berbagai permasalahan pembangunan; dan peningkatan produktivitas dan ethos kerja.

Walaupun bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi rata-rata penduduk sudah melampaui angka kecukupan energi yang dianjurkan, namun komposisi yang masih didominasi oleh padi-padian (lebih dari 60 persen), merupakan tantangan yang masih dihadapi dalam dasa warsa terakhir ini. Dengan tingginya peranan padi-padian, berarti ketergantungan pangan pada beras sangat besar dan peranan kelompok komoditas lainnya seperti dari sumber protein

menjadi kecil. Tantangannya dengan demikian adalah bagaimana meningkatkan peranan atau sumbangan kelompok komoditas selain padi-padian ke tingkat yang sesuai dengan Pola Pangan Harapan, yang sekaligus berarti mengurangi ketergantungan sumber energi dan protein dari beras serta meningkatkan nilai gizi masyarakat.

Tingkat ketersediaan energi dari beras rata-rata Indonesia sudah mencapai 1.506 kalori yang berarti sudah jauh diatas angka optimum berimbang setinggi 1.000 kalori. Total ketersediaan kalori masyarakat Indonesia rata-rata mencapai 2.650 kalori yang hampir menyamai Singapura dan Malaysia yang rata-rata 2.850 kalori. Maka masalah utama dalam penyediaan pangan Indonesia adalah diversifikasi pangan dengan meningkatkan ketersediaan produk hewani, kacang-kacangan dan hortikultura. Ini berarti misi utama sektor pertanian dalam pemenuhan penyediaan pangan ditingkatkan dari pencapaian swasembada beras menjadi peningkatan nilai gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Walaupun selama PJPT I kita telah berhasil secara nyata mengurangi tingkat kemiskinan pedesaan dari 40,4 persen tahun 1976 menjadi 14,3 persen tahun 1990, akan tetapi 82,0 persennya mempunyai penghasilan utama dibidang pertanian. Dengan demikian tantangan pembangunan sektor pertanian dalam penanggulangan kemiskinan ini masih cukup besar dimasa datang.

Kualitas sumberdaya manusia yang ada di sektor pertanian relatif masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kualitas sumberdaya manusia yang ada di sektor lain khususnya sektor industri dan jasa yang ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan rata-rata mereka yang ada di sektor pertanian ini. Seiring dengan itu produktivitas mereka yang ada di sektor pertanian masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berada di luar sektor pertanian.

Sebagian besar penyuluh pertanian kurang menguasai bidang pengembangan agribisnis yang akan disuluhkan, sehingga mereka kurang mampu membimbing petani dan nelayan secara optimal. Disamping itu sistem pengembangan tenaga fungsional penyuluh

pertanian belum dapat mendorong motivasi penyuluh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan petani. Jumlah penyuluh pertanian yang diperlukan bagi kegiatan pembangunan pertanian setiap sub sektor masih terbatas. Dalam hubungan ini, peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting mengingat kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani aspek penyuluhan pertanian ini. Penambahan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh di samping menyangkut langsung dengan ketersediaan alokasi dana yang sangat terbatas juga berkaitan erat dengan upaya aparat pemerintah untuk memberikan motivasi dan penghargaan yang layak kepada para penyuluh pertanian. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian untuk tetap berperan baik sebagai pendorong perkembangan ekonomi nasional maupun kemampuan bersaing di pasar internasional hanya dapat dijawab apabila pengembangan produk pertanian berorientasi pasar, sehingga upaya peningkatan efisiensi teknis dan ekonomis akan muncul dengan sendirinya. Dalam kaitan ini kemampuan analisa pasar agar dapat mengantisipasi potensi pasar dalam negeri maupun luar negeri perlu dikembangkan.

Berbagai tantangan yang dihadapi pada tingkat nasional antara lain menyeimbangkan kegiatan pembangunan di kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Selanjutnya tantangan yang dihadapi setempat adalah masalah pelestarian sumberdaya alam berkaitan dengan penggunaan bahan kimia berupa pestisida dan pupuk, kegiatan penanganan peladang berpindah, lahan kritis dan daerah pantai. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya khusus untuk mengetahui berbagai permasalahan dan tantangan di atas.

Peluang sumber-sumber pertumbuhan sektor pertanian antara lain berdasarkan kenyataan sebagai berikut :

- (1) Kehilangan dan kerusakan pasca panen masih cukup tinggi, yaitu sekitar 20 persen atau lebih. Kehilangan ini dapat ditekan dalam upaya peningkatan produksi melalui perbaikan teknologi panen dan pasca panen.

- (2) Produk pertanian kita masih berkualitas rendah, sehingga upaya peningkatan kualitas dapat dipandang sebagai sumber pertumbuhan yang dapat meningkatkan nilai tambah.
- (3) Penggunaan produk pertanian semakin beragam, tidak saja untuk makanan langsung dan ekspor tetapi juga untuk bahan baku industri dan pakan ternak di dalam negeri. Diversifikasi penggunaan produk merupakan sumber pertumbuhan yang mendorong produksi melalui peningkatan permintaan terhadap produk-produk olahan pertanian.
- (4) Masih kurangnya insentif untuk menarik investasi di bidang agribisnis terutama akibat belum adanya kesesuaian iklim ekonomi makro, seperti tingkat bunga, situasi perdagangan internasional, upaya menekan resiko di bidang agribisnis sesuai dengan sifat-sifat alamiah produk pertanian yang mempunyai tingkat ketergantungan tinggi terhadap alam, musiman, selain "makan-tempat" dan mudah busuk.

Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, sumber-sumber pertumbuhan dapat dikelompokkan menjadi :

- (1) Sumber pertumbuhan yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas seperti intensifikasi, diversifikasi, dan penerapan teknologi biologi dan mekanis yang dapat meningkatkan efisiensi teknis.
- (2) Sumber pertumbuhan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah, yaitu peningkatan kualitas produk pertanian dan produk olahannya serta perusahaan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
- (3) Sumber pertumbuhan yang berasal dari penggalan potensi permintaan, antara lain dengan meningkatkan permintaan melalui diversifikasi penggunaan produk, pengolahan, dan pemasaran.

Peningkatan mutu perencanaan dan monitoring di tingkat wilayah, khususnya dalam hal ketepatan informasi dan data harus dilaksanakan dengan konsisten. Kualitas koordinasi yang sudah terjadi perlu ditingkatkan, sebagai suatu upaya yang seimbang, selaras, dan serasi. Di samping peningkatan pelaksanaan perencanaan dan monitoring, kegiatan lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar wilayah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pembangunan pertanian di daerah. Koordinasi antar wilayah aparat pelayanan di tiap wilayah sebaiknya memanfaatkan lembaga-lembaga yang telah ada.

IV. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Kebijakan pembangunan pertanian Repelita VI yang perlu dikemukakan lebih mendalam adalah sebagai berikut: (A) kebijakan pengembangan sumberdaya manusia, (B) kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam, berwawasan lingkungan, dan (C) kebijakan pembangunan pertanian wilayah.

A. Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pertanian terdiri dari para petani, pekebun, peternak dan nelayan; aparat pembina di pusat dan daerah yang terdiri dari perencana, pelaksana, peneliti, dan penyuluh pertanian, serta aparat pelaksana yang berada di luar pembinaan Departemen Pertanian.

Dari segi fisik pengembangan sumberdaya manusia pertanian dicerminkan oleh peningkatan pendapatan dan daya beli rumah tangga pertanian serta peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi. Hal ini dapat dicapai apabila pertanian mampu meningkatkan pendapatan riil para pelakunya dan mampu menyediakan pangan yang cukup, semakin beragam, dan berkualitas serta dengan harga yang sesuai dengan daya beli. Apabila hal ini tercapai, maka masyarakat pertanian akan merupakan pasar yang andal baik bagi barang-barang produksi maupun jasa. Pada gilirannya, roda perekonomian pedesaan akan terus berputar secara berkelanjutan.

Dari segi kualitas, pengembangan sumberdaya manusia pertanian dicapai melalui peningkatan daya nalar dan produktivitas kerjanya. Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian ini fokus utama diarahkan pada : (1) peningkatan penguasaan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; dan (2) penguasaan kualitas ketrampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin dan tanggung jawab.

Kebijakan lain adalah meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan, termasuk penyesuaian orientasi program yang mengacu pada

peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dengan sistem agribisnis, mengembangkan keterpaduan antar subsistem dan meningkatkan kemampuan perencanaan dan monitoring baik di pusat maupun di daerah. Orientasi program juga perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi-budaya setempat, potensi sumberdaya pertanian, dan potensi pengembangan wilayah.

Dengan adanya keragaman kualitas sumberdaya manusia pertanian, kebijakan dalam penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan harus disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik sumberdaya suatu lokasi dan kebutuhan yang dirasakan bagi pengembangan daerah tersebut. Selain itu rancangan teknologi pertanian yang akan dimasyarakatkan seyogyanya disesuaikan dengan karakteristik wilayah pengembangan baik ditinjau dari agroekologinya maupun sumberdaya manusianya.

B. Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Alam Berwawasan Lingkungan

Kegiatan pertanian pada hakekatnya adalah suatu upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil-hasil biologik yang diperlukan guna mendukung hidup dan kehidupan manusia. Sumberdaya alam berfungsi sebagai faktor produksi dan sumber kesejahteraan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Besar kecilnya hasil pertanian yang diperoleh pada setiap kurun waktu tertentu sangat tergantung pada kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk mempertahankan ataupun meningkatkan produksi pertanian, upaya-upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup mutlak harus dilaksanakan. Dengan perkataan lain, pembangunan pertanian haruslah merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian secara garis besar bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan pendapatan petani, pekebun, peternak dan nelayan melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal untuk usaha pertanian;
- (2) Mempertahankan dan mengembangkan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan sebagai faktor produksi dan sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya;
- (3) Mengembangkan sumberdaya manusia pertanian sehingga merupakan unsur pelaksanaan pembangunan pertanian yang tangguh sekaligus sebagai insan pembina lingkungan hidup.
- (4) Mengembangkan manajemen pengelolaan lingkungan bagi kegiatan pertanian melalui kegiatan AMDAL, termasuk monitoring terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian yang secara potensial berdampak negatif sangat penting terhadap lingkungan.

C. Kebijakan Pembangunan Pertanian Wilayah

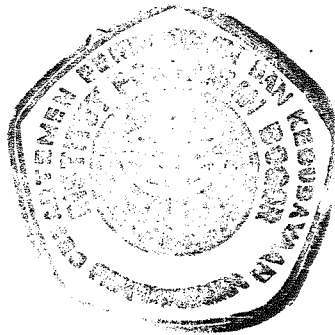
Pelaksanaan pembangunan pertanian wilayah berarti perwujudan pemerataan pembangunan pertanian di seluruh wilayah Nusantara sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Diversifikasi pertanian, khususnya dalam diversifikasi produksi untuk memperluas spektrum usaha dan pasar, merupakan konsep dengan lingkup nasional. Pada tingkat wilayah yang lebih kecil, pengembangan produksi ini dilaksanakan sesuai dengan keunggulan komparatif wilayah, sehingga pembangunan pertanian wilayah mengarah pada pengembangan pusat-pusat produksi dengan spesifikasi komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif di setiap wilayah.

Dalam usaha mempercepat pembangunan pertanian wilayah, hal-hal berikut akan menjadi titik perhatian utama dalam pembangunan pertanian :

- (1) Pembangunan pertanian wilayah ditekankan pada peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian di wilayah, sehingga kesenjangan pendapatan dan taraf hidup rumah tangga antar wilayah dapat diperkecil.

- (2) Pilihan komoditas yang dikembangkan di setiap wilayah mengacu pada keunggulan komparatif wilayah dan peluang pasar, baik pasar lokal, regional, maupun internasional.
- (3) Pilihan pola pengembangan usahatani didasarkan pada kesesuaian potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Upaya-upaya di atas perlu didukung oleh : (a) pengembangan kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah, (b) peningkatan kemampuan sumberdaya pertanian wilayah sesuai dengan potensi dan arah pengembangan pertanian wilayah, (c) pembinaan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian yang sesuai dengan potensi wilayah, dan (d) pembangunan prasarana ekonomi yang dapat menunjang percepatan pembangunan pertanian wilayah dan sekaligus meningkatkan keunggulan komparatif wilayah secara berkesinambungan.



V. STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN

A. Strategi Dasar

Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian Repelita VI strategi dasar yang dikembangkan adalah pembangunan pertanian dengan penerapan sistem agribisnis terpadu terlanjutkan. Dalam strategi dasar ini keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian merupakan suatu prakondisi yang mutlak adanya. Dengan demikian, salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan pertanian dengan strategi ini adalah adanya keterpaduan yang serasi dan saling mendukung antar subsistem dalam agribisnis, antar sektor dalam sistem perekonomian nasional, dan antar wilayah dalam tatanan kesatuan Nusantara. Dengan pengembangan sistem agribisnis terpadu ini maka dapat dihasilkan produk-produk pertanian dan produk agroindustri berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional.

Penerapan sistem agribisnis menghendaki kesiapan sumberdaya manusia pertanian sebagai pelaku utamanya. Untuk itu orientasi pembinaan sumberdaya manusia pertanian seyogyanya diarahkan tidak saja pada kemampuannya dalam berusahatani, tetapi juga pada kemampuannya dalam bisnis pertanian. Dengan pendekatan ini manusia pertanian dapat lebih kritis dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, termasuk dalam meningkatkan efisiensi sumberdaya pembangunan yang dimilikinya dan dalam mengantisipasi peluang pasar.

Penerapan strategi sistem agribisnis terlanjutkan menghendaki dilaksanakannya pembangunan pertanian berteknologi maju yang berwawasan lingkungan; yang berarti pemanfaatan sumberdaya alam harus selalu mengacu pada prinsip efisiensi, mampu melestarikan kemampuan produktifnya, dan sekaligus dapat menjaga agar degradasi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Kegiatan manajemen lingkungan dalam kegiatan pertanian dan penciptaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

pertanian yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan merupakan dua faktor kunci bagi keberhasilan upaya ini.

Sejalan dengan strategi di atas, untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian Repelita VI usaha-usaha pokok pembangunan pertanian meliputi :(a) pengembangan diversifikasi dan intensifikasi pertanian, (b) peningkatan rehabilitasi sumberdaya pertanian, dan (c) pengembangan demokrasi ekonomi di sektor pertanian. Keseluruhan usaha-usaha pokok di atas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra pertanian dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian. Yang terakhir ini berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan rumahtangga pertanian, peningkatan produktivitas kerja, kenyamanan kerja, kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan dan teknologi pertanian, dan kualitas konsumsi pangan dan gizi.

B. Strategi Pembangunan Agribisnis Terpadu Terlanjutkan

Strategi untuk membangun agribisnis terpadu terlanjutkan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan keterkaitan fungsional antar subsistem sehingga setiap kegiatan pada masing-masing subsistem dapat berlangsung berkesinambungan dengan efisiensi tinggi. Hal ini berarti bahwa pola pemanfaatan sumberdaya alam, modal, maupun sumberdaya manusia harus efisien dan optimal pada setiap simpul kegiatan dan selalu mengacu pada mekanisme pasar. Pada tiap tahapan agribisnis harus mampu mendistribusikan insentif kepada pelaku yang terlibat secara proporsional sesuai dengan masukannya. Hanya dengan penciptaan sistem insentif yang adil maka keseluruhan sistem agribisnis ini dapat berlangsung secara terlanjutkan.

Kedua, pembangunan agribisnis harus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan. Adanya kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang cepat di pedesaan dan terbatasnya aktivitas ekonomi pedesaan pada kegiatan pertanian, khususnya usahatani; serta rendahnya pertumbuhan sektor non pertanian di pedesaan telah melahirkan permasalahan dan kesenjangan sosial ekonomi antar daerah

dan antara desa dengan kota. Agribisnis merupakan perpanjangan dan perluasan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang diharapkan mampu menjaring angkatan kerja pedesaan dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Ketiga, pengembangan agribisnis harus diarahkan pada pengembangan mitra usaha skala besar dan skala kecil secara serasi, sehingga nilai tambah agribisnis dapat dinikmati secara adil oleh seluruh pelakunya. Sektor produksi pertanian di Indonesia dicirikan oleh skala usahatani kecil. Dengan demikian pengembangan agribisnis skala besar harus mampu menarik usaha skala kecil dalam satu konsep ketergantungan yang saling menguntungkan.

Keempat, usaha agribisnis skala besar pada umumnya telah memiliki kemampuan permodalan, teknologi maupun manajemen yang cukup baik. Dukungan kebijaksanaan yang diperlukan bagi pengembangan usaha ini lebih bersifat makro yang antara lain berupa kemudahan peraturan ekspor bagi produk agroindustri, impor input dan peralatan produksi, perijinan usaha, perpajakan, tata niaga, pengembangan prasarana transportasi dan pemasaran. Agroindustri skala kecil dan menengah, dengan berbagai keterbatasannya, di samping dukungan kebijaksanaan makro juga memerlukan pembinaan sumberdaya manusia, permodalan, teknologi, manajemen dan pemasaran agar lebih berorientasi pasar dan mampu meningkatkan efisiensi produksi. Keterkaitan antar yang besar dan yang kecil dalam lingkungan kemitraan yang sesuai menjadi salah satu strategi pembangunan pertanian dalam pengembangan agribisnis terpadu terlanjutkan.

VI. PENUTUP

Untuk masa mendatang khususnya periode pertama pembangunan jangka panjang tahap (PJPT) II diharapkan tantangan yang dihadapi selama Pelita V dapat ditanggulangi. Harapan ini tentunya memerlukan dukungan dari semua pihak serta instansi terkait agar pelaksanaan penanggulangannya dapat terlaksana sesuai rencana.

Atas dasar berbagai tantangan dan peluang yang ada, kebijakan dan strategi bidang produksi pangan dalam mencapai swasembada pangan diarahkan kepada upaya peningkatan penganekaragaman produksi pangan disertai dengan upaya peningkatan mutu gizi pangan masyarakat.

Jakarta, 29 Mei 1993

Sekretaris Jenderal
Departemen Pertanian

DR. Soetatwo Hadiwigeno

BAHAN ACUAN

1. DEPARTEMEN PERTANIAN. Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Pembangunan Pertanian pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (1993-2018). Jakarta, 12 Juli 1992
2. DEPARTEMEN PERTANIAN. Rancangan Repelita VI Pertanian. Jakarta, Maret 1993